



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**UJI COBA PENERAPAN SERTIFIKAT DIGITAL DAN SISTEM PENGAMANAN  
KOMUNIKASI DOKUMEN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, perlu melakukan penyempurnaan dan pengembangan sistem kerahasiaan, integritas dan Keabsahan informasi /Dokumen Elektronik pada Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan sistem kerahasiaan, integritas dan Keabsahan informasi/ Dokumen Elektronik dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk melakukan uji coba penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengaman Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

tentang Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 526);
  7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 753);
  8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

